

TESIS
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN
MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY



Oleh
MUHAMMAD RIZKI ANGUERAH
NIM. 2320215310110

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2025

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN
MENGUNAKAN CRYPTOCURRENCY**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh :

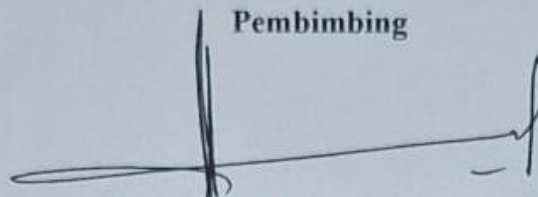
**MUHAMMAD RIZKI ANGUERAH
NIM. 2320215310110**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2025**

Judul : Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencucian Uang Dengan Menggunakan Cryptocurrency
Nama : Muhammad Rizki Anugerah
NIM : 2320215310110

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing

Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Diuji
Pada Tanggal 10 Juli 2025**

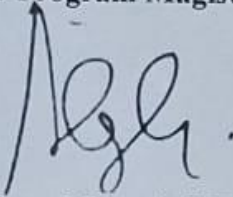
Pembimbing



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP 19720208 199903 1 004

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP 19750615 200312 1 001

Tesis ini telah dipertahankan didepan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Anugerah

NIM : 2320215310110

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 11 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan

Muhammad Rizki Anugerah
NIM 2320215310110



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Diberikan kepada

MUHAMMAD RIZKI ANUGERAH

2320215310110

Telah dilakukan Pengecekan uji Kemiripan Tugas Akhir dengan indeks sebesar :

20 %

Banjarmasin, 23 Juni 2025

Mengetahui,

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

ANUGERAH, MUHAMMAD RIZKI. 2025. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY . Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.. 110 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Cryptocurrency; Pencucian Uang; Penegakan Hukum.

Perkembangan Teknologi yang semakin pesat memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan manusia, salah satu teknologi terbesar dalam ranah keuangan yaitu Cryptocurrency, di Indonesia Cryptocurrency diakui sebagai aset digital hal ini diatur dalam Peraturan BAPPETI Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Meskipun regulasi Indonesia memberikan ketentuan teknis yang jelas bagi platform yang ingin memperdagangkan aset kripto harus mendapat izin BAPPETI agar dapat beroperasi secara legal. Kendati demikian kemajuan teknologi melalui Cryptocurrency ini memiliki potensi sebagai sarana pencucian uang dengan platform ilegal. Perlunya pemahaman Aparat Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pencucian Uang melalui Cryptocurrency, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah apa saja kendala Pembuktian yang dihadapi dalam menangani kasus tindak Pidana Pencucian Uang dengan Cryptocurrency dan bagaimana langkah serta strategi dalam menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Cryptocurrency secara ilegal. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan tipe Penelitian Hukum Doktrinal hasil dari penelitian ini adalah Pembuktian dari TPPU menggunakan cryptocurrency atau aset kripto tidak dapat dilakukan dikarenakan unsur orang (persoon) dari frasa setiap orang untuk pelaku dapat diidentifikasi identitasnya disebabkan teknologi dari cryptocurrency atau aset kripto dapat digunakan secara anonim (anonymous). Kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering saat ini hanya ada satu regulasi terkait penindakan kejahatan yang melibatkan mata uang digital yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanganan Aset Kripto Sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana. Peraturan ini dipandang belum cukup, sebab hanya dapat mengikat bagi penegak hukum di bawah lembaga kejaksaan dan tidak mengatur prosedur penyitaan mata uang digital yang terdesentralisasi maka perlu membuat rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia selain itu juga Melakukan kerjasama internasional untuk membasmi jaringan pencucian melalui cryptocurrency. Kedua langkah strategi dalam menghadapi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Menggunakan Cryptocurrency adalah Memperluas substansi pengaturan dengan tidak hanya menasar aset kripto yang tersentralisasi, tetapi juga aset kripto yang terdesentralisasi yang berkaitan dengan tindak pidana, Peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis aparat penegak hukum mengenai seluk beluk mata uang digital dan kripto, Kolaborasi multipihak yang intensif dengan melibatkan aparat penegak hukum dengan kepakaran

di bidang intelijen, keuangan dan perbankan, serta ahli dari aktor, dan Kerjasama International

HAFIFAH, NOVIATI SARIANI NUR. 2025. NEUROLAW AGE LIMIT OF CRIMINAL RESPONSIBILITY TOWARDS CHILDREN FROM A JUSTICE PERSPECTIVE. Program Mangister Ilmu Hukum, Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. Suprpto, S.H.,M.H.. 110 Pages

ABSTRACT

Keywords: *Cryptocurrency; Money Laundering; Law Enforcement.*

The rapid development of technology has a major impact on human life, one of the largest technologies in the financial sector is Cryptocurrency, in Indonesia Cryptocurrency is recognized as a digital asset, this is regulated in BAPPETI Regulation Number 5 of 2019 concerning technical provisions for the Implementation of the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange, although Indonesian regulations provide clear technical provisions for platforms that want to trade crypto assets must obtain permission from BAPPETI in order to operate legally. However, technological advances through Cryptocurrency have the potential to be a means of money laundering with Illegal platforms. The need for Law Enforcement Officers to understand Money Laundering Crimes through Cryptocurrency, so the purpose of this study is what are the obstacles to Evidence faced in handling cases of Money Laundering Crimes with Cryptocurrency and what steps and strategies are taken to deal with Money Laundering Crimes through Cryptocurrency Illegally. The research method used is the Normative Legal Research method with the Doctrinal Legal Research type, the results of this study are Proof of TPPU using cryptocurrency or crypto assets cannot be done because the element of the person (person) of the phrase each person for the perpetrator can be identified because the technology of cryptocurrency or crypto assets can be used anonymously. The obstacles faced in implementing criminal law enforcement policies to combat money laundering are currently only one regulation related to the prosecution of crimes involving digital currency, namely the Attorney General's Guidelines Number 7 of 2023 concerning the Handling of Crypto Assets as Evidence in Criminal Cases. This regulation is considered insufficient, because it can only be binding on law enforcers under the prosecutor's office and does not regulate the procedure for confiscating decentralized digital currency, so it is necessary to create a framework for renewing criminal law in Indonesia in addition to carrying out international cooperation to eradicate laundering networks through cryptocurrency. The two strategic steps in dealing with Money Laundering Crimes Using Cryptocurrency are Expanding the substance of the regulation by not only targeting centralized crypto assets, but also decentralized crypto assets related to criminal acts, Increasing the knowledge and technical capabilities of law enforcement officers regarding the ins and outs of digital currency and crypto, Intensive multi-party collaboration involving law enforcement officers with expertise in intelligence, finance and banking, as well as experts from actors, and International Cooperation

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas anugerah rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “. KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY.” pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Drs. H. Abdul Muchir (alm) dan Ibu Hj. Susilawati (Almh) yang selalu mendoakan penulis, kepada Istri penulis, Noviati Sariani Nur Hafifah yang tercinta yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian tesis ini hingga selesai, mertua penulis, Bapak Drs. Antonius Hadi Yuwono, M.Pd., dan Ibu Hj. Hafifah yang selalu memberikan doa yang terbaik pada penulis. Muhammad Muhaimin, Muhammad Noor Rizali, Muhammad Ridho Muzakkir, Maulida Magfirah Selaku Kakak Penulis, Selanjunya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat selaku Pembimbing Penulis, yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan serta masukan dan saran dengan humanis kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini
2. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, selaku penguji Penulis, yang telah memberikan masukan serta saran untuk penyempurnaan Tesis Penulis
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus selaku Penguji Penulis, yang telah memberikan kritik dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan Tesis penulis.
4. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mentransfer keilmuannya kepada penulis selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023.

Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak/Ibu menjadi ladang ibadah, amal sholeh dan mendapatkan balasan disisi Allah SWT, amin.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan hanya kepunyaan dzat yang maha sempurna yaitu Allah SWT. Dengan semangat kebaikan, penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan penulisan Tesis ini. Harapan penulis semoga dengan segala kekurangan penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 01 Juli 2025

Muhammad Rizki Anugerah
NIM. 2320215310110

DAFTAR ISI

		Hlm
COVER DEPAN		i
COVER DALAM		ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS		iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS		Iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN		V
SERTIFIKAT PLAGIASI		vi
ABSTRAK		vii
ABSTRACT		viii
UCAPAN TERIMAKASIH		x
DAFTAR ISI		xii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	9
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Manfaat Penelitian.....	10
	E. Keaslian Penelitian.....	11
	F. Tinjauan Pustaka	13
	F.1. Pengertian Pencucian Uang.....	13
	F.2. Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana	17
	F.3. <i>Cryptocurrency</i>	19
	G. Tinjauan Teori	22
	G.1. Teori Pembuktian.....	23
	G.2. Teori Pidanaan	26
	G.3. Teori Kebijakan Kriminal.....	32
	G.4. Teori Penegakan Hukum.....	33
	H. Metode Penelitian	35
	I. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	41
	J. Jadwal Kegiatan	42
BAB II	KENDALA YANG DI HADAPI DALAM PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY	43
	A. Regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Menggunakan <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia.....	43
	B. Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan <i>Cryptocurrency</i>	65

	C.	Kendala pada Perkara Pencucian Uang di Indonesia dengan Cryptocurrency.....	69
BAB III		KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MENGGUNAKAN CRYPTOCURRENCY	76
	A.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency.....	76
	B.	Hambatan serta dampak yang ditimbulkan melalui Cryptocurrency Ilegal dalam penegakan Hukum.....	82
	C.	Tantangan dan Perbaikan dalam Regulasi Hukum.....	84
BAB V		PENUTUP	98
	A.	Keimpulan	98
	B.	Saran	99
DAFTAR PUSTAKA			